



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSUNANNYA

BPA2

NOMOR BUKTI PEMOTONGAN	PERIODE PENGHASILAN	SIFAT PEMOTONGAN	STATUS BUKTI PEMOTONGAN
2508L6EZU	09-2025-12-2025	TIDAK FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NIK/NPWP : 6472030303830009
A.2 Nama : DARMAWAN
A.3 Alamat : JALAN KULINTANG GG.CIPARI
A.4 NIP/NRP : 198303032025211066
A.5 Jenis Kelamin : Pria
A.6 Pangkat/Golongan : V
A.7 Status PTKP : K2
A.8 Posisi : PPPK
A.9 Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja : Tidak

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

B.1.1 Kode Objek Pajak : 21-100-01 B.1.2 Objek Pajak : Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap
B.2 Jenis Pemotongan : Kurang dari Setahun

NO B.3	URAIAN B.4	JUMLAH (Rp) B.5
I PENGHASILAN BRUTO		
1.	Gaji Pokok/Pensiun	10.046.000
2.	Tunjangan Istri	1.004.600
3.	Tunjangan Anak	401.840
4.	Tunjangan Perbaikan Penghasilan	0
5.	Tunjangan Struktural / Fungsional	0
6.	Tunjangan Beras	1.158.720
7.	Tunjangan Lain-lain	0
8.	Penghasilan Tetap dan Teratur Lainnya yang Pembayarananya Terpisah dari Pembayaran Gaji	0
9.	Jumlah Penghasilan Bruto (1 s.d. 8)	12.611.160
II PENGURANG PENGHASILAN BRUTO		
10.	Biaya Jabatan / Biaya Pensiun	630.558
11.	Iuran terkait Pensiun atau Hari Tua	0
12.	Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib yang Dibayarkan melalui Pemberi Kerja	0
13.	Jumlah Pengurangan (10 s.d. 12)	630.558
III PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
14.	Jumlah Penghasilan Neto (9 - 13)	12.611.160
15.	Penghasilan Neto dari Pemotongan Sebelumnya	0
16.	Jumlah Penghasilan Neto untuk Perhitungan PPh Pasal 21 (Setahun / Disetahunkan)	12.611.160
17.	Penghasilan Tidak Kena Pajak	67.500.000
18.	Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan (16 - 17)	0
19.	PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan	0
20.	PPh Pasal 21 Terutang	0
21.	PPh Pasal 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya	0
22.	PPh Pasal 21 Terutang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)	0
23.	PPh Pasal 21 yang Telah Dipotong	0
24.	PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (22 - 23)	0

C. IDENTITAS PEMOTONG PPh

C.1 NPWP : 0001138577741000
C.2 NITKU atau Nomor Identitas Subunit Organisasi : 0001138577741000000000 - PENGADILAN NEGERI SAMARINDA BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG
C.3 Nama Pemotong : PENGADILAN NEGERI SAMARINDA BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG
C.4 Tanggal : 18 Januari 2026
C.5 Nama Penandatanganan : YESICA SINAGA
C.6 Pemyataan : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan ini telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.



Ditandatangani secara elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Pajak mengantar bahwa Bukti Pemotongan ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200 ♦ informasi@djppajak.go.id ♦
www.djppajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE : BPE-38057/CT/KPP.1410/2026
Tanggal : 10 Maret 2026
NPWP : 6472030303830009
Nama Wajib Pajak : DARMAWAN
Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Tahun Pajak : 2025
Masa Pajak : Januari - Desember 2025
Status SPT : Normal
Saluran : Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT : 10 Maret 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

Terima kasih telah menggunakan layanan digital DJP. SPT Anda telah tercatat dan diterima dengan baik